



DINAMIKA KERJA SAMA PERTAHANAN AS-JEPANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KAWASAN

Rizki Roza*)

Abstrak

Sejumlah pernyataan Trump pada masa kampanye telah memicu kekhawatiran Jepang atas masa depan kerja sama pertahanan kedua negara. Ada kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump akan menarik pasukan dari pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Jepang. Melihat sikap pemerintahan Trump setelah resmi menjabat, dan memperhitungkan kepentingan nasional AS di kawasan, maka sangat kecil kemungkinan hal itu akan benar-benar dilakukan oleh pemerintahan Trump. Namun, tampaknya tuntutan AS terhadap Jepang untuk pembagian beban yang lebih besar dalam kerangka kerja sama pertahanan mereka akan tetap ada. Tuntutan ini dapat saja berujung pada dorongan peningkatan peran militer Jepang yang lebih luas, yang berarti akan melahirkan kekuatan militer Jepang yang lebih besar dan mampu mengubah perimbangan kekuatan di kawasan. Indonesia harus mencermati perkembangan ini dan mempersiapkan diri untuk merespons segala kemungkinan yang dapat terjadi.

Pendahuluan

Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Presiden Donald Trump. Pertemuan pemimpin kedua negara ini menarik perhatian banyak pihak yang berusaha memahami arah kebijakan keamanan AS terhadap Jepang di bawah kepemimpinan Trump, yang sempat dipertanyakan sebagai akibat pernyataan-pernyataan Trump pada masa kampanye. PM Abe mengkhawatirkan masa depan kerja sama pertahanan kedua negara di bawah pemerintahan Presiden Trump.

Aliansi militer AS-Jepang yang sudah terbangun sejak berakhirnya Perang Dunia II tidak hanya penting bagi Jepang, tetapi memberikan keuntungan strategis bagi AS. Lebih jauh dari itu, kehadiran militer AS di kawasan juga sangat memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik yang masih menyimpan banyak potensi konflik. Setiap dinamika keamanan di kawasan ini tentu juga akan memengaruhi posisi Indonesia sebagai bagian dan merupakan salah satu kekuatan penting di kawasan. Penting bagi Indonesia untuk mencermati perkembangan

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: rizki.roza@dpr.go.id



hubungan kerja sama pertahanan antara AS dan Jepang. Tulisan ini ingin menganalisis dinamika kerjasama pertahanan AS-Jepang di bawah pemerintahan Presiden Trump, dan bagaimana implikasi hubungan kedua negara terhadap stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Kekhawatiran Jepang

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Jepang sudah menjadi sekutu tradisional AS di kawasan Indo-Pasifik. Hubungan kerja sama pertahanan antara kedua negara yang sudah terjalin erat selama puluhan tahun mengalami guncangan akibat sejumlah pernyataan yang disampaikan Trump dalam kampanyenya. Trump mempertanyakan beberapa landasan hubungan AS-Jepang. Menurut Trump, AS berbuat terlalu banyak untuk membantu pertahanan Jepang dan Jepang mengambil keuntungan yang terlalu besar dari hubungan kedua negara. Trump mengatakan, jika Jepang tidak mau menanggung biaya pasukan AS, maka negaranya akan menarik pasukan dari kawasan. Trump bahkan sempat mengemukakan gagasan untuk membiarkan Jepang dan negara-negara lain di kawasan untuk memiliki senjata nuklir guna menghadapi negara tetangga mereka, Korea Utara (Korut) yang telah berulang kali melakukan ujicoba nuklir dan rudal balistik. Trump juga mendesak pembayaran yang lebih besar untuk penempatan pasukan AS di negara-negara sekutunya.

PM Abe melihat kepemimpinan Trump dapat meredupkan hubungan kerja sama kedua negara yang telah terbangun lama. Kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS merupakan kejutan bagi Jepang, karena negara itu sebelumnya sangat mendukung Hillary Clinton. Kondisi ini kemudian mendesak PM Abe untuk memperbaiki hubungan dengan Trump dan berupaya memastikan komitmen AS untuk tetap mendukung keamanan Jepang. Di tengah peningkatan sikap asertif China dan aksi-aksi provokatif Korut, Abe berupaya menghilangkan kekhawatiran Jepang terhadap pernyataan-pernyataan Trump pada masa kampanye. Jepang masih membutuhkan jaminan bahwa pemerintahan Trump akan mematuhi komitmen Washington untuk membela jika Jepang mendapat serangan, termasuk yang terkait dengan sengketa wilayah di Laut China Timur.

Setelah resmi menjabat, pemerintahan Presiden Trump berusaha menjawab kekhawatiran Jepang atas masa depan hubungan kerja sama pertahanan kedua negara. Trump menyambut hangat kunjungan kenegaraan PM Abe pada 10 Februari lalu. Di sela pertemuan tersebut, melalui sebuah pernyataan bersama pemimpin kedua negara dikatakan bahwa AS tetap berkomitmen untuk menjamin keamanan sekutunya, melindungi Jepang dari serangan yang menggunakan kekuatan militer konvensional maupun nuklir, termasuk dalam sengketa Jepang dengan China atas Kepulauan Senkaku di Laut China Timur. Trump juga menyatakan akan bekerja sama untuk mempromosikan kepentingan bersama, termasuk kebebasan navigasi. Namun, Trump tidak menjelaskan dengan rinci pernyataannya tersebut. Trump juga tampak mengesampingkan janji masa kampanyenya yang akan mendesak pembagian beban yang lebih besar terhadap Jepang dalam penempatan pasukan AS di Jepang. Pernyataan Trump belum sepenuhnya menjawab pertanyaan bagaimana arah hubungan kerja sama pertahanan kedua negara di bawah pemerintahan Trump.

Kerjasama Pertahanan AS-Jepang

Untuk dapat membaca arah hubungan kerja sama pertahanan kedua negara di bawah pemerintahan Presiden Trump, perlu dipahami latar belakang hubungan yang telah terbangun dan berkembang hingga saat ini. Sejak berakhirnya Perang Dunia (PD) II, sebagai konsekuensi kekalahan Jepang dari kekuatan sekutu, konstitusi Jepang menyatakan bahwa negara itu tidak boleh memiliki angkatan perang atau angkatan bersenjata, melainkan hanya pasukan pertahanan yang terbatas. Selanjutnya keamanan Jepang berada di bawah perlindungan kekuatan militer AS. Pakta pertahanan AS-Jepang, menyatakan bahwa AS memiliki kewajiban untuk melindungi Jepang jika mereka berada dalam ancaman serangan negara lain.

Dalam perkembangannya, Jepang yang semula setiap perkembangan kekuatan militernya diawasi secara ketat, mulai dipandang sebagai mitra potensial AS. Selama Perang Dingin, AS mulai menuntut Jepang untuk berbagi beban yang lebih besar dalam kerangka pakta pertahanan mereka. Meskipun tidak memiliki kekuatan

militer dalam pengertian konvensional, pada kenyataannya dewasa ini Jepang memiliki kekuatan militer yang didukung teknologi mutakhir dengan anggaran pertahanan ke-5 terbesar dunia. Jepang kemudian dianggap sebagai kekuatan strategis yang dibutuhkan AS untuk ikut mengimbangi pertumbuhan pesat kekuatan militer China. Dorongan terhadap Jepang untuk berbagi beban lebih besar tidak menurun meskipun Pemerintahan Presiden Obama menjalankan strategi *rebalancing* di kawasan Asia Pasifik. Tuntutan pembagian beban yang lebih besar tidak hanya terkait sejumlah dana, tetapi juga transfer teknologi militer dan perluasan peran militer Jepang. Bagi AS, beberapa tahun terakhir di tengah tekanan keterbatasan anggaran pertahanannya, pembagian beban yang lebih besar akan menempatkan Jepang sebagai negara yang memiliki peran sentral dalam mendukung kemampuan AS menjaga stabilitas kawasan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tuntutan pembagian beban yang lebih besar yang disampaikan Trump pada masa kampanye sesungguhnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Jepang, di bawah pemerintahan PM Abe yang dikenal nasionalis, telah mengupayakan banyak penyesuaian untuk memenuhi tuntutan-tuntutan AS dalam kerangka aliansi pertahanan mereka. Abe telah sejak lama mengupayakan perluasan peran militer Jepang melalui perubahan konstitusi demi menyesuaikan diri pada tuntutan AS dan perkembangan lingkungan strategis.

Kehadiran AS di Kawasan

Aliansi pertahanan antara kedua negara tidak hanya penting bagi Jepang, tetapi juga memberikan keuntungan strategis bagi AS dengan memiliki pangkalan militer di negara itu. Bahkan aliansi kedua negara juga penting bagi stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik, termasuk bagi Indonesia. Kawasan Indo-Pasifik masih menyimpan sejumlah persoalan keamanan yang membutuhkan kehadiran kekuatan-kekuatan besar yang mampu menciptakan keseimbangan kekuatan. Di antara persoalan itu yang paling menonjol adalah isu Semenanjung Korea dan kebebasan navigasi di Laut China Selatan.

Hingga saat ini kawasan Semenanjung Korea masih merupakan titik panas yang

sewaktu-waktu dapat memicu terjadinya perang, terlebih dengan meningkatnya aksi-aksi provokatif oleh pemimpin Korut, Kim Jong Un. Uji coba penembakan rudal balistik yang kembali dilakukan Korea Utara pada 12 Februari lalu, dapat dilihat sebagai aksi unjuk kekuatan untuk menentang sikap keras pemerintahan Presiden Trump terhadap Pyongyang. Penguasaan hulu ledak nuklir dan rudal balistik oleh Korut merupakan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan kawasan. Kekuatan militer AS selama ini dipandang memadai untuk mencegah terjadinya perang di kawasan tersebut. Kehadiran kekuatan militer AS untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Semenanjung Korea, serta komitmen AS untuk terus menekan Korut agar menghentikan program nuklirnya masih dibutuhkan demi stabilitas dan keamanan kawasan. Bagi AS, mempertahankan kehadirannya di kawasan merupakan salah satu alternatif yang sulit dihindari demi memastikan AS memiliki kekuatan tangkal yang efektif untuk mencegah rudal Korut menjangkau daratan AS.

Selain isu Semenanjung Korea, upaya China untuk menguasai sebagian besar wilayah Laut China Selatan (LCS) juga telah menjadi sumber ketegangan di kawasan selama beberapa dekade terakhir, tidak hanya antara negara-negara yang bersengketa, tetapi juga negara lainnya yang berkepentingan. Ketegangan berulang kali terjadi dan terus meningkat. Karena memiliki kepentingan yang cukup besar atas kebebasan navigasi di perairan LCS, selama ini AS telah menjalankan operasi patroli yang diklaim sebagai tindakan perlindungan terhadap kebebasan pelayaran. AS berusaha hadir sebagai kekuatan pengimbang mengingat terdapat ketimpangan kekuatan militer yang sangat besar antara China dan negara lainnya yang bersengketa. Tidak hanya secara langsung menghadirkan kekuatan AL nya di kawasan sengketa, AS juga berupaya membangun keseimbangan kekuatan di kawasan dengan mendukung peningkatan kekuatan militer negara-negara yang bersengketa, misalnya dengan membantu Vietnam membangun kekuatan militer.

Belum terselesaikannya persoalan di Semenanjung Korea dan LCS saja sudah cukup menjadi faktor yang memaksa AS untuk mempertahankan kehadirannya di kawasan Indo-Pasifik. Keseimbangan

kekuatan masih menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya perang di kawasan ini. Dengan kata lain, sangat kecil kemungkinan pemerintahan Presiden Trump akan mewujudkan janji Trump pada masa kampanye untuk menarik pasukannya dari pangkalan militer AS di Jepang dan Korsel, dan membiarkan keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut terguncang.

Penutup

Memahami kekhawatiran Jepang, pemerintahan Trump berusaha meyakinkan PM Abe bahwa AS masih berkomitmen terhadap pakta pertahanan antara kedua negara dan menjamin akan membela jika Jepang mendapat ancaman serangan dari negara lain, termasuk yang terkait dengan sengketa wilayah di LCT. Meskipun Trump tampaknya berusaha menghindari pembicaraan mengenai pembagian beban yang lebih besar terhadap Jepang dalam kerangka kerja sama pertahanan mereka, hal itu bukanlah sesuatu yang baru. Pemerintahan PM Abe telah banyak melakukan upaya untuk memenuhi tuntutan AS dalam pembagian beban yang lebih berimbang, baik dengan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membiayai pasukan AS di Jepang, maupun dengan mengupayakan transfer teknologi militer dan perluasan peran militer Jepang.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa sangat kecil kemungkinan pemerintahan Trump akan mengambil risiko menarik pasukannya dari Jepang dan Korsel. Negara-negara sekutu AS dan negara sahabat lainnya, termasuk Indonesia yang berkepentingan atas stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik tampaknya tidak perlu khawatir akan terjadinya kekosongan kekuatan di kawasan sebagaimana yang terjadi ketika AS menarik diri dari kawasan PascaPerang Dingin. Yang masih perlu dicermati adalah bagaimana bentuk pembagian beban yang lebih berimbang yang akan dituntut pemerintahan Trump terhadap Jepang. Jika tuntutan itu berujung pada peningkatan peran militer Jepang yang jauh lebih besar, maka Jepang yang pada dasarnya memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan didukung anggaran pertahanan yang besar pula akan mampu tampil sebagai salah satu kekuatan dominan di kawasan. Kekuatan-kekuatan utama

di kawasan akan dipaksa melakukan perhitungan ulang terhadap kebijakan strategisnya agar mampu merespons munculnya kekuatan besar yang baru terlepas dari belenggunya.

Indonesia, dengan Doktrin Poros Maritim Dunia, yang berusaha turut memengaruhi masa depan kawasan Samudera Hindia dan Pasifik tentunya juga harus mencermati perkembangan ini dan mempersiapkan diri agar dapat merespons setiap perubahan perimbangan kekuatan yang mungkin terjadi di kawasan. Sangat penting bagi Indonesia, tidak hanya pemerintah tetapi juga DPR RI, untuk terus mencermati tumbuhnya kekuatan-kekuatan di lingkungan strategis Indonesia, agar Indonesia tidak 'terjepit' di tengah perebutan pengaruh di antara kekuatan-kekuatan baru tersebut.

Referensi

- "Abe Kecam Peluncuran Rudal Korut, Trump: AS Dukung Penuh Jepang", <http://internasional.kompas.com/read/2017/02/12/12400161/abe.kecam.peluncuran.rudal.korut.trump.as.dukung.penuh.jepang>, diakses 13 Februari 2017.
- "A Worried Japan Seeks Trump's Assurances on Washington Visit", <http://edition.cnn.com/2017/02/09/politics/abe-trump-japan-washington-visit/>, diakses 12 Januari 2017.
- "Jepang Harap Kunjungan Menhan AS Perkuat Keamanan Kawasan", <http://www.antaraneews.com/berita/610697/jepang-harap-kunjungan-menhan-as-perkuat-keamanan-kawasan>, diakses 12 Februari 2017.
- "PM Abe-Trump Akan Bertemu pada 10 Februari", <http://www.antaraneews.com/berita/609430/pm-abe-trump-akan-bertemu-pada-10-februari>, diakses 12 Februari 2017.
- "Soal Tembakan Rudal Korut, Bentuk Provokasi Baru untuk AS", <http://internasional.kompas.com/read/2017/02/12/09145371/soal.tembakan.rudal.korut.bentuk.provokasi.baru.untuk.as>, diakses 13 Februari 2017.
- "Trump Says U.S. Committed to Japan Security, in Change from Campaign Rhetoric", <http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-japan-idUSKBN15P17E>, diakses 12 Januari 2017.